



BKAD
BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

**KOLABORASI
SUMUT BERKAH**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RENCANA KERJA TAHUN 2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan.....	4
1.4	Sistematika	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4	Review terhadap RKPD	21
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	24
3.3	Tujuan, Sasaran dan Rencana Aksi serta Target KSD	27
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	29
4.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2026 dan Renja OPD Tahun 2026.....	30
4.3	Pagu Anggaran Untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	34
4.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas.....	34
4.5	Indikator Kinerja Utama OPD.....	36
4.6	Inovasi.....	40
BAB V	PENUTUP	
	Penutup.....	41

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (**Renja-PD**), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64). Rencana pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan hasil evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tahap penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (**RKPD**) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Menimbang maksud tersebut, maka penyusunan RKPD memiliki tujuan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara (PPAS) ;
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD ;
3. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antar program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (**Renstra-PD**) Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan laporan lainnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, selaras dengan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 ;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, sedangkan tujuannya adalah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara serta untuk mengetahui :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
2. Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

3. Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
4. Target Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
5. Pagu indikatif program, kegiatan dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
2. Mengevaluasi Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
5. Sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu terhadap RKPD

BAB. III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Tujuan, Sasaran dan Rencana Aksi Pelaksanaan serta Target KSD

BAB. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2026 dan Renja OPD Tahun 2026

4.3. Pagu Anggaran Untuk Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

4.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas

4.5. Indikator Kinerja Utama OPD

BAB. V. P e n u t u p

B A B II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan perlu dilakukan reviu terhadap Renja PD tahun 2024 yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) tahun berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang dilakukan suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan.

a. Evaluasi Anggaran Program dan Kegiatan

Pada pelaksanaan program dan kegiatan tersedia anggaran belanja yang berguna untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan.

Jenis kelompok belanja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari :

1. Belanja operasi; Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal; Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Belanja tidak terduga; Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer; Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1. Belanja Operasi dengan anggaran belanja sebesar Rp. 44.048.563.231,00 dan realisasi sebesar Rp. 39.247.947.578,00 atau 89,10%
2. Belanja Modal dengan anggaran belanja sebesar Rp. 1.280.615.820,00 dan realisasi sebesar Rp. 904.498.999,00 atau 70,63%
3. Belanja Tidak Terduga dengan anggaran belanja sebesar Rp. 55.604.071.276,00 dan realisasi sebesar Rp. 38.044.824.602,00 atau 68,42%
4. Belanja Transfer dengan anggaran belanja Rp. 3.138.048.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.460.293.697.000 atau 78,40%

Jumlah anggaran belanja seluruhnya sebesar Rp. 3.238.981.930.327,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.538.490.968.179,00 atau 78,37%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel. 2.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA			
BELANJA OPERASI	44.048.563.231,00	39.247.947.578,00	89,10
Belanja Pegawai	20.977.947.464,00	18.289.594.325,00	87,18
Belanja Barang dan Jasa	23.070.615.767,00	20.958.353.253,00	90,84
BELANJA MODAL	1.280.615.820,00	904.498.999,00	70,63
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	990.615.820,00	854.498.999,00	86,26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	250.000.000,00	50.000.000,00	20,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	55.604.071.276,00	38.044.824.602,00	68,42
Belanja Tidak Terduga	55.604.071.276,00	38.044.824.602,00	68,42
BELANJA TRANSFER	3.138.048.680.000,00	2.460.293.697.000,00	78,40
Belanja Bagi Hasil	2.800.000.000.000,00	2.276.980.578.692,00	81,32
Belanja Bantuan Keuangan	338.048.680.000,00	183.313.118.308,00	40,92
Jumlah Belanja	3.238.981.930.327,00	2.538.490.968.179,00	78,37

b. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja mengacu pada evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan masa periode tertentu. Pada evaluasi capaian kinerja ini dengan menggunakan masa periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024.

Pada hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.2** dengan hasil sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang pada umumnya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Capaian target program Renja Perangkat Daerah adalah menggambarkan capaian kinerja organisasi sesuai tugas dan fungsi.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
BKAD Provinsi Sumatera Utara

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan						
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %				
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)				11= 10/1	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
	Keuangan																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100	%	100	%	100	%	96%	%	100	%	100	%	100	%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi persiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan Perangkat Daerah. Selain itu melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilindungi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada **Tabel 2.3.**

Tabel 2.3 (Tabel T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan
BKAD Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tersusunnya dokumen anggaran pemprov			tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	
2	Terlaksananya penerbitan SP2D			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Terlaksananya penatausahaan Surat Keputusan pengelola keuangan dan barang milik daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tersusunnya dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	
6	Tersusunnya dokumen laporan barang milik daerah pemprov			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian indikator antara lain :

- a. Adanya keterlibatan pimpinan secara langsung;
- b. Koordinasi dengan perangkat daerah yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan;
- c. Adanya dukungan dari Pimpinan Daerah dalam rangka pengambilan keputusan;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring yang dilakukan terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapai indikator antara lain :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga masih terdapat hambatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan;
- b. Dilakukannya efisiensi anggaran perangkat daerah sehingga adanya beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana;
- c. Terbitnya Keputusan, Peraturan dan Perundang-undangan pada saat tahun berjalan;
- d. Kurangnya sumberdaya manusia (ASN) untuk pelaksanaan tugas terkait sehingga hasil kinerja kurang maksimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat terlaksana dengan baik. Adapun kendala-kendala untuk kegiatan-kegiatan yang dihadapi sebagian besar karena perubahan nomenklatur, perubahan kebijakan dan efisiensi pagu anggaran kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran berjalan. Mekanisme pelaksanaannya disesuaikan dengan proyeksi belanja yang diprediksi tidak tercapai.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi atas tidak terlaksananya beberapa kegiatan pada Perangkat Daerah, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik atas setiap kegiatan. Begitu juga dengan koordinasi antar bidang lebih ditingkatkan. Selain itu, perlu juga diadakan pelatihan / bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung kelancaran kinerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Koordinasi antar instansi/Perangkat Daerah (PD) dan Pemerintah Kabupaten / Kota baik dalam hal pengumpulan data dan lainnya, untuk lebih ditingkatkan.

Capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Untuk perencanaan penganggaran dan pengelolaan belanja daerah telah digunakan aplikasi SIPD yang terintegrasi dengan pemerintah pusat yang dimulai dengan penganggaran, penatausahaan dan laporan belanja daerah sehingga tercipta sistem administrasi yang baik.
2. Pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset telah menggunakan aplikasi Simbada Online. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan Perangkat Daerah sehingga data Barang Milik Daerah (BMD)/ Aset Provinsi Sumatera Utara dapat diperoleh secara akurat.

Aplikasi telah di update dengan menggunakan QR Code guna pendataan Barang Milik Daerah (BMD) sehingga tidak perlu dilakukan pendataan dengan manual.

3. Pada pelaksanaan pembayaran telah digunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk pembayaran belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh Bank penerbit kartu kredit dalam hal ini Bank Sumut sesuai dengan kewajiban pada waktu yang disepakati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
4. Aplikasi Drupadi yaitu Penerbitan Pembuatan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) untuk memberhentikan gaji bagi yang akan pensiun atau pindahan gaji ke instansi pindahan/ tujuan tanpa harus datang ke BKAD Provsu tetapi pengurusan dilakukan secara online.

Adapun Capaian Kinerja Kegiatan Prioritas pada **Tabel 2.4** dan Capaian Indikator Kinerja Daerah pada **Tabel 2.5** yang dicapai antara lain yaitu :

Tabel 2.4
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PRIORITAS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	CAPAIAN 2024
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan Kua dan Perubahan PPAS APBD yang disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan KUA dan PPAS APBD yang disusun	Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Tersusun 2 Dokumen KUA dan PPAS APBD dan 2 Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		2. Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Diverifikasi 42 Dokumen RKA dan 42 Dokumen Perubahan RKA
		3. Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Tersusun 1 Dokumen APBD dan 1 Dokumen Perubahan APBD
		4. Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Diverifikasi 42 Dokumen DPA, dan 42 Dokumen Perubahan DPA
		5. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban SKPD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
		6. Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD SKPD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Laporan Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya

2.	Mewujudkan penataan dan pengelolaan asset yang berkualitas	7.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	$\frac{(\text{Jumlah Tanah yang bersertifikat})}{(\text{Jumlah seluruh tanah})} \times 100\%$	Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	64,98 % persil Tanah yang telah disertifikat
		8.	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun dalam rangka penyusunan neraca	Berita Acara Rekonsiliasi	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen laporan aset 42 OPD
3.	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota	9.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja})}{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi})} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranper kada Kab/Kota tentang APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota yang di evaluasi
		10.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja})}{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi})} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranper kada Kab/Kota tentang Perubahan APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	75 % SK Gubsu tentang Perubahan APBD Kab/Kota yang di evaluasi
		11.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi Tepat waktu paling lambat 15 hari kerja})}{(\text{Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi})} \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranper kada Kab/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100% SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang di evaluasi

Tabel 2.5
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2024

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	0
2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
4	Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang disertifikasi	87,45	64,98	73
5	Persentase jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	100	100	100
6	Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100	100	100

Pada indikator "Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikasi tidak menacapai target yaitu Target sebesar 87,45 dan realisasi sebesar 64,98. Hal ini disebabkan antara lain :

- Aset tanah masih tercatat sebagai aset tanah PTPN;
- Tidak ditemukannya kesepakatan tapal batas aset tanah;
- Aset tanah masih termasuk kawasan hutan lindung;
- Adanya perbedaan yang signifikan luasan aset tanah pada KIB dengan luasan aset tanah riil.

Tantangan :

1. Peraturan Perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Euforia terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang sering menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara eksekutif, legislatif dan masyarakat baik yang di provinsi maupun di kabupaten/kota, namun kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang.

Peluang

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berwenang antara lain mengesahkan DPA-SKPD dan menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Untuk itu BKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
2. Sesuai Pasal 1 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas antara lain melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Tugas tersebut saat ini dilaksanakan oleh Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka BKAD Provinsi Sumatera

Utara diharapkan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.4 Review terhadap RKPD

Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara di sesuaikan dengan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun berjalan. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Catatan tersebut antara lain terdapat program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Hasil review dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	Keuangan						Keuangan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BKAD	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran	100	%	40.293.708.141,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BKAD	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran	100	%	30.533.524.464,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	%	200.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	%	81.706.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100	%	20.083.708.141,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100	%	21.014.547.464,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	%	300.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100	%	5.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	%	1.360.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	%	687.450.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	%	6.850.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100	%	4.386.028.820,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	1.200.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	7.500.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	3.729.612.180,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	2.800.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	629.180.000,00	

	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	3.556.920.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	3.204.494.770.714,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	6.760.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	4.421.186.450.00	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	3.440.000.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	1.605.940.300.00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	4.170.000.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	1.940.708.398.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	3.700.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	1.961.780.550.00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	3.535.250.000.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	3.193.854.401.316.00	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	3.600.000.000,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	710.753.700.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	9.620.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	3.953.635.149.00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	9.620.000.000,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	3.953.635.149.00	

B A B III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Lembaga Nasional dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai kaitan yang erat dimana tugas pokok dan fungsi harus mendukung Tujuan dan Sasaran Lembaga Nasional (Bina Keuangan Daerah Kemendagri). Keterkaitan Tujuan dan Sasaran diantaranya adalah :

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN BKAD PROVSU

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Mempertahankan Pencapaian Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada Tujuan yaitu Optimalisasi keuangan, Aset dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota dan Sasaran yaitu Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Mewujudkan Penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas dan Meningkatkan kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Lembaga Nasional yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efisien dan tertib administrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga

perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

- a. Memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang ;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi serta sinergitas antar Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat ;
- d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembiayaan yang didanai dari APBD Provlinsi Sumatera Utara.

Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi, yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD ;
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 6 kegiatan dan 36 sub kegiatan;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan.

Tabel 3.2
TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	
Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	22	23	25	25	25	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	33	38	40	40	40	
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	90	92	94	96	98	
		Persentase Penurunan SILPA	1	0.80	0.70	0.60	0.50	
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	
Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Mewujudkan penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10	12	14	16	18	
		Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikasi	84.42	84.42	87.42	90	93	
Optimalisasi pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah kab/kota	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100	100	100	100	100	

3.3 Tujuan, Sasaran dan Rencana Aksi serta Target KSD

Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 atas **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas** antara lain sesuai **Tabel 3.3** :

Tabel 3.3
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN					OPD
				2025	2026	2027	2028	2029	
2	Keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Keberlanjutan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	- Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	√	√	√	√	√	BKAD
			- Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√	BKAD

Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 antara lain sesuai **Tabel 3.4** :

Tabel 3.4
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
TAHUN 2025-2029

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
3	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BKAD dan Inspektorat

Target Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yaitu :

- Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Tahun 2025 ke 12 (Dua Belas) kali, Tahun 2026 ke 13 (Tiga Belas) kali , Tahun 2027 ke 14 (Empat Belas) kali, Tahun 2028 ke 15 (Lima Belas) kali dan Tahun 2029 ke 16 (Enam Belas) kali.

Adapun Rencana Aksi KSD sebagaimana pada **Tabel 3.5** antara lain :

TABEL 3.5
TUJUAN, SASARAN, RENCANA AKSI DAN TARGET KSD TAHUN 2025-2029

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	RENCANA AKSI	TARGET
Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Melaksanakan Pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap OPD atas pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Provinsi sebanyak 16 kali

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset.

Tugas Pokok Badan adalah berkaitan dengan Keuangan dan Aset yaitu :

“Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan dan kas daerah, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset;
- b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2026 dan Renja OPD Tahun 2026.

Adapun Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026 dan Renja Tahun 2026 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
7. Pelaksanaan Forum Perangkat daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.

➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.

➤ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

➤ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
2. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
7. Fasilitas Kunjungan Tamu;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

➤ **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pengadaan Mebel;
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

➤ **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;

5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD;
 8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;
 10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
 11. Koordinasi Perencanaan Pembiayaan.
- **Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**
1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota;
 2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
 3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 4. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
 5. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah;
 6. Konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
- **Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Penatausahaan Pembiayan Daerah;
 3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan

Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga (PFK);

5. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Hutang Daerah yang Timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas;
6. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait;
7. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

➤ **Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah**

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban;
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, Blid, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi;
5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
6. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi

➤ **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.

➤ **Kegiatan Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**

1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

➤ **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

1. Penyusunan Standar Harga;
2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
6. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
7. Pengamanan Barang Milik Daerah;
8. Penilaian Barang Milik Daerah;
9. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Pengapusan Barang Milik Daerah;
11. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
13. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.3 Pagu Anggaran Untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dialokasi anggaran dana yang tertuang dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026. Adapun Pagu Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2026 sesuai pada lampiran **Tabel 4.1**.

4.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas

Adapun anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 adalah seperti **Tabel 4.2** dibawah ini :

Tabel 4.2
PRGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	ANGGARAN	
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan Perundang-undangan	100%		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.904.468.564
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	7.306.268.500
				a.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	420.650.000
				b.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	420.050.000
				c.	Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	144.500.000
				d.	Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD	171.250.000
				e.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	147.850.000
				f.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	156.600.000
				g.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.219.652.250
				h.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.625.116.250
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.598.200.064
				i.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	812.604.064
				j.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	785.596.000
2.	Mewujudkan penataan dan pengelolaan asset yang berkualitas	Persentase jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	100%		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.167.022.352
					Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.167.022.352
				a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.253.908.352
				b.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	134.270.000
				c.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	156.078.000
				d.	Pengamanan Barang Milik Daerah	622.766.000

3.	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu	100%		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.010.105.432
					Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.010.105.432
				a.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	716.204.732
				b.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	64.817.900
				c.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	229.082.800

4.5 Indikator Kinerja Utama OPD

Adapun target Indikator Kinerja Utama OPD terhadap Pembangunan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 antara lain :

Tabel 4.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET

No	Indikator	Satuan	Target Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH PADA
PEMBANGUNAN DAERAH

No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI OPD PADA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET				
			TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	22 %	23 %	25 %	25 %	25 %
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	33 %	38 %	40 %	40 %	40 %
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %
4	Persentase Penurunan SILPA	Persen	1 %	0.80 %	0.70 %	0.60 %	0.50 %
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	10 %	12 %	14 %	16 %	18 %
7	Persentase Tanah Milik Pemprov yang Disertifikasi	Persen	84.42 %	84.42 %	87.42 %	90 %	93 %
8	Persentase Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.6 Inovasi

Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara diantaranya melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota. Melalui Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan dan monitoring pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Dalam Pelaksanaan tugas, Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota membuat inovasi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu penggunaan aplikasi "Siap Keuda On Air".

- Kategori : Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
- Inisiasi : Inovasi dibangun atas inisiasi mandiri untuk membantu kegiatan evaluasi APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- Inovasi tentang : Sistem pelayanan konsultasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota se Sumatera Utara secara virtual;
- Latar belakang :
 - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)
 - Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis;
- Dampak : Optimalisasi pelayanan kegiatan konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota

B A B V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sangat tergantung kepada kerjasama dan dukungan serta komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh komponen, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan perlu dievaluasi antara penganggaran anggaran kegiatan dan realisasi hasil anggaran untuk mencapai output yang dipergunakan sehingga dapat dinilai keberhasilan dari pelaksanaan sub kegiatan.

Kiranya rencana kerja ini dapat menjadi pedoman bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta menjadi standar dalam pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

A. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.

Rencana Kerja BKAD sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk :

1. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan ;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan
3. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
4. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun ;
5. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

B. Rekomendasi.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ini, maka rekomendasi untuk pelaksanaan Renja Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan ;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan tepat ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Medan, 2025
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



**H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos., M.A.P.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19731211 199303 1 005**

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			3,731,559,120,390			3,061,742,584,401	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat layanan administrasi umum dan perkantoran	%	100	29,230,627,682	APBD	100	34,586,414,209
X	XX	01	101		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100	69,000,000	APBD	100	168,741,250
X	XX	01	101	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	20,000,000	APBD	1 dokumen	20,000,000
X	XX	01	101	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	9,800,000	APBD	1 dokumen	9,800,250
X	XX	01	101	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	9,800,000	APBD	1 dokumen	9,800,250
X	XX	01	101	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	9,800,000	APBD	1 dokumen	9,800,250
X	XX	01	101	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	9,800,000	APBD	1 dokumen	47,040,000
X	XX	01	101	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	9,800,000	APBD	1 laporan	9,800,250
X	XX	01	101	09	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medan, Sumatera Utara	1 berita acara	0	APBD	1 berita acara	62,500,250

Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
X	XX	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	18,267,690,701	APBD	100	21,909,564,841
X	XX	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Medan, Sumatera Utara	100 Orang	17,761,670,701	APBD	100 Orang	21,398,004,841
X	XX	01	102	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	473,600,000	APBD	1 dokumen	474,600,000
X	XX	01	102	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	16,210,000	APBD	1 laporan	18,480,000
X	XX	01	102	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	16,210,000	APBD	1 laporan	18,480,000
X	XX	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi BMD perangkat daerah	%	100	10,020,000	APBD	100	13,080,000
X	XX	01	103	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	10,020,000	APBD	1 laporan	13,080,000
X	XX	01	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	284,750,000	APBD	100	512,600,000
X	XX	01	105	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Disediakan	Medan, Sumatera Utara	1 paket	45,000,000	APBD	1 paket	148,500,000
X	XX	01	105	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	60,000,000	APBD	1 dokumen	112,800,000
X	XX	01	105	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	129,750,000	APBD	1 dokumen	153,300,000
X	XX	01	105	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan, Sumatera Utara	100 orang	50,000,000	APBD	100 orang	98,000,000

Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
X	XX	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	4,174,057,340	APBD	100	4,830,675,621
X	XX	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Medan, Sumatera Utara	1 paket	48,040,000	APBD	1 paket	45,621,000
X	XX	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Medan, Sumatera Utara	5 paket	1,421,725,840	APBD	5 paket	1,116,661,796
X	XX	01	106	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Medan, Sumatera Utara	1 paket	215,128,000	APBD	1 paket	26,160,125
X	XX	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Medan, Sumatera Utara	2 paket	326,368,500	APBD	2 paket	648,537,700
X	XX	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Medan, Sumatera Utara	2 paket	348,150,000	APBD	2 paket	460,000,000
X	XX	01	106	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	29,995,000	APBD	1 dokumen	29,995,000
X	XX	01	106	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	0	APBD	1 laporan	171,500,000
X	XX	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	1,500,150,000	APBD	1 laporan	2,049,700,000
X	XX	01	106	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	284,500,000	APBD	1 dokumen	282,500,000
X	XX	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan BMD perangkat daerah	%	100	156,288,160	APBD	100	1,285,088,280
X	XX	01	107	05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Medan, Sumatera Utara	1 unit	78,144,080	APBD	1 unit	400,000,000
X	XX	01	107	06	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Medan, Sumatera	1 paket	78,144,080	APBD	1 paket	78,949,500
X	XX	01	107	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Medan, Sumatera Utara	-	0	APBD	-	806,138,780

Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
X	XX	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	4,349,041,681	APBD	100	4,494,064,717
X	XX	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	10,000,000	APBD	1 laporan	12,000,000
X	XX	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	1,331,638,228	APBD	1 laporan	1,609,000,000
X	XX	01	108	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	327,000,000	APBD	1 laporan	55,000,000
X	XX	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	2,680,403,453	APBD	1 laporan	2,818,064,717
X	XX	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan BMD perangkat daerah	%	100	1,919,779,800	APBD	100	1,372,599,500
X	XX	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Medan, Sumatera Utara	7 unit	948,566,000	APBD	7 unit	321,738,500
X	XX	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Medan, Sumatera Utara	5 unit	731,923,800	APBD	5 unit	224,161,000
X	XX	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Medan, Sumatera Utara	1 unit	0	APBD	1 unit	558,500,000
X	XX	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Medan, Sumatera Utara	1 unit	239,290,000	APBD	1 unit	268,200,000
5	02				KEUANGAN				3,698,023,263,360			3,022,969,387,040
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	%	100	3,698,023,263,360	APBD	100	3,022,969,387,040
5	02	02	101		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	%	100	8,239,723,679	APBD	100	8,003,032,500
5	02	02	101	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Medan, Sumatera Utara	5 dokumen	463,550,020	APBD	5 dokumen	420,650,000

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	02	02	101	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Medan, Sumatera Utara	5 dokumen	470,351,600	APBD	5 dokumen	425,050,000
5	02	02	101	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Medan, Sumatera Utara	43 dokumen	166,822,000	APBD	42 dokumen	144,500,000
5	02	02	101	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Medan, Sumatera Utara	43 dokumen	217,392,600	APBD	42 dokumen	171,250,000
5	02	02	101	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Medan, Sumatera Utara	43 dokumen	169,522,732	APBD	42 dokumen	147,850,000
5	02	02	101	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Medan, Sumatera Utara	43 dokumen	199,065,086	APBD	42 dokumen	156,600,000
5	02	02	101	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Medan, Sumatera Utara	11 dokumen	2,290,228,236	APBD	10 dokumen	2,219,652,250
5	02	02	101	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Medan, Sumatera Utara	25 dokumen	3,674,508,125	APBD	12 dokumen	3,625,116,250
5	02	02	101	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Medan, Sumatera Utara	2 dokumen	43,885,500	APBD	1 dokumen	99,988,000
5	02	02	101	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Medan, Sumatera Utara	10 dokumen	487,049,980	APBD	1 dokumen	479,873,000
5	02	02	101	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Medan, Sumatera Utara	5 dokumen	57,347,800	APBD	1 dokumen	112,503,000

Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
5	02	02	102		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kab/kota	%	100	2,499,711,632	APBD	100	1,389,883,332
5	02	02	102	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Medan, Sumatera Utara	33 laporan	949,991,232	APBD	33 laporan	716,204,732
5	02	02	102	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Medan, Sumatera Utara	33 laporan	199,991,000	APBD	33 laporan	64,817,900
5	02	02	102	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Medan, Sumatera Utara	33 laporan	419,985,100	APBD	33 laporan	229,082,800
5	02	02	102	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Medan, Sumatera Utara	33 dokumen	269,999,860	APBD	33 dokumen	88,287,900
5	02	02	102	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Medan, Sumatera Utara	2 laporan	405,370,520	APBD	1 laporan	191,800,000
5	02	02	102	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Medan, Sumatera Utara	20 dokumen	254,373,920	APBD	33 dokumen	99,690,000

Kode Rekening				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
5	02	02	103		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	%	100	3,509,590,000	APBD	100	3,224,160,236
5	02	02	103	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Medan, Sumatera Utara	42 dokumen	359,590,000	APBD	3 dokumen	308,999,260
5	02	02	103	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Medan, Sumatera Utara	6 dokumen	40,000,000	APBD	1 dokumen	40,000,000
5	02	02	103	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Medan, Sumatera Utara	12 dokumen	540,000,000	APBD	6 dokumen	435,306,108
5	02	02	103	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Medan, Sumatera Utara	14 laporan	530,000,000	APBD	42 laporan	564,569,608
5	02	02	103	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	30,000,000	APBD	1 dokumen	30,000,000
5	02	02	103	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Medan, Sumatera Utara	12 dokumen	1,510,000,000	APBD	42 dokumen	1,296,881,456

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	02	02	103	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Medan, Sumatera Utara	4 dokumen	500,000,000	APBD	3 dokumen	548,403,804
5	02	02	104		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	%	100	3,819,985,640		100	3,645,603,128
5	02	02	104	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Medan, Sumatera Utara	7 dokumen	616,128,200	APBD	1 dokumen	565,342,064
5	02	02	104	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Medan, Sumatera Utara	7 laporan	873,235,440	APBD	4 laporan	812,604,064
5	02	02	104	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	367,694,000	APBD	3 laporan	381,006,000
5	02	02	104	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Medan, Sumatera Utara	4 dokumen	705,750,000	APBD	8 dokumen	785,596,000
5	02	02	104	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	178,213,000	APBD	1 dokumen	189,952,000
5	02	02	104	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	434,740,000	APBD	1 dokumen	480,318,000

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	02	02	104	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Medan, Sumatera Utara	450 orang	644,225,000	APBD	75 orang	430,785,000
5	02	02	105		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	3,678,680,346,181		100	3,005,527,229,102
5	02	02	105	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	372,622,000	APBD	12 laporan	263,516,000
5	02	02	105	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Medan, Sumatera Utara	33 laporan	351,867,500	APBD	33 laporan	125,357,925,000
5	02	02	105	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	123,500,000,000	APBD	1 laporan	300,186,989,291
5	02	02	105	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Medan, Sumatera Utara	33 laporan	3,554,455,856,681	APBD	33 laporan	2,579,718,798,811
5	02	02	106		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	1,273,906,228	APBD	100	1,179,478,742
5	02	02	106	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Medan, Sumatera Utara	10 dokumen	1,273,906,228	APBD	10 dokumen	1,179,478,742
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pelaksanaan pengelolaan BMD	%	100	4,305,229,348	APBD	100	4,186,783,152
5	02	03	101		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pelaksanaan BMD	%	100	4,305,229,348	APBD	100	4,186,783,152
5	02	03	101	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	383,048,736	APBD	1 dokumen	350,378,736
5	02	03	101	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	33,280,000	APBD	1 dokumen	30,560,000

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	02	03	101	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	146,814,000	APBD	1 dokumen	144,224,000
5	02	03	101	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Medan, Sumatera Utara	42 OPD	76,278,000	APBD	42 OPD	27,662,000
5	02	03	101	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Medan, Sumatera Utara	42 laporan	1,193,302,896	APBD	42 laporan	1,253,908,352
5	02	03	101	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Medan, Sumatera Utara	42 laporan	349,780,000	APBD	42 laporan	313,894,000
5	02	03	101	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	534,072,310	APBD	1 laporan	622,766,000
5	02	03	101	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Medan, Sumatera Utara	1 laporan	363,983,536	APBD	1 laporan	541,374,064
5	02	03	101	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Medan, Sumatera Utara	42 laporan	171,492,000	APBD	42 laporan	81,490,000
5	02	03	101	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Medan, Sumatera Utara	1 dokumen	430,315,270	APBD	1 dokumen	436,192,000
5	02	03	101	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Medan, Sumatera Utara	42 laporan	263,354,000	APBD	42 laporan	134,270,000
5	02	03	101	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Medan, Sumatera Utara	42 laporan	178,186,000	APBD	42 laporan	156,078,000
5	02	03	101	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Medan, Sumatera Utara	33 orang	181,322,600	APBD	66 orang	93,986,000